

PENGARUH OPINI AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

B. Marshanda Sasela¹, Sjeddie R. Watung², Frida M. Sumual³

¹²³ Akuntansi, Universitas Negeri Manado

e-mail: ¹Marshandasasela@unima.ac.id, ²Sjeddiewatung@unima.ac.id, ³fridasumual@unima.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak opini audit yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap prevalensi korupsi di dalam pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Utara selama rentang waktu 2019 hingga 2024. Investigasi didasarkan pada pengamatan bahwa kasus korupsi tetap ada di entitas pemerintah daerah tertentu, terlepas dari penerimaan pendapat audit dari BPK. Pendapat audit yang diberikan oleh CPC berfungsi sebagai penilaian kesesuaian laporan keuangan yang disiapkan oleh pemerintah kota, sehingga menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Metodologi yang digunakan bersifat kuantitatif, menggunakan kerangka regresi data panel. Dataset yang sedang diperiksa terdiri dari data sekunder yang berasal dari laporan inspeksi CPC bersama dokumentasi insiden korupsi dalam pemerintahan lokal. Sampel penelitian mencakup 10 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, dengan pengamatan temporal yang mencakup dari 2019 hingga 2024, menghasilkan total pengamatan kumulatif 60. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat audit CPC memiliki dampak negatif yang signifikan secara statistik terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapat audit yang diberikan kepada pemerintah daerah dikaitkan dengan penurunan prevalensi korupsi.

Kata kunci: opini audit BPK, tingkat korupsi, pemerintah daerah

Astract: *This study aims to investigate the impact of audit assessments issued by the Supreme Audit Agency (BPK) on the prevalence of corruption within local governmental bodies in North Sulawesi Province from 2019 to 2024. The motivation for this research stems from the ongoing occurrence of corruption in various local administrations, despite the issuance of audit assessments by the BPK. The audit assessment rendered by the BPK reflects the reliability of financial statements and indicates the level of accountability and transparency in the fiscal governance of local governments. This analysis adopts a quantitative approach, utilizing a panel data regression methodology. The data utilized are secondary sources obtained from BPK audit documents and records of corruption incidents in local governments. The sample includes 10 regencies and cities in North Sulawesi Province over a duration of six years (2019–2024), totaling 60 observations. The results indicate that BPK audit assessments have a negative and statistically significant effect on corruption levels within local governments. This implies that enhancements in the audit assessment provided to local governments are associated with a decline in the incidence of corruption.*

Keywords: BPK audit opinion, corruption level, local gove

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tantangan yang signifikan dalam administrasi keuangan negara di Indonesia. Ini menimbulkan masalah kritis bagi negara-negara berkembang secara global, dengan Indonesia tidak terkecuali selama beberapa dekade terakhir (Kantohe & Sumual, 2023). Kejadian ini telah terwujud tidak hanya pada lingkup nasional tetapi juga telah meresap ke tingkat pemerintahan daerah.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2023), praktik korupsi di daerah sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Tindakan korupsi mengakibatkan kerugian besar bagi negara, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Hasil survei ACFE menunjukkan bahwa sekitar 64% kasus fraud di Indonesia tergolong sebagai kasus korupsi. Hal ini sejalan dengan data Transparency International (2024) yang

menempatkan Indonesia dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 36, menurun dari skor 40 pada tahun 2019 yang mencerminkan kondisi persepsi korupsi yang masih perlu perbaikan. Namun, pada tahun 2020 skor tersebut menurun menjadi 37, yang menunjukkan adanya peningkatan persepsi korupsi. Pada tahun 2021, skor IPK mengalami peningkatan menjadi 38; Namun, itu mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022, yang akhirnya menghasilkan skor 34. Penurunan ini menunjukkan persepsi yang memburuk mengenai inisiatif yang bertujuan memerangi korupsi di Indonesia. Dalam jangka waktu berikutnya, skor IPK menunjukkan peningkatan sederhana, naik menjadi 34 pada tahun 2023 dan selanjutnya naik menjadi 37 pada tahun 2024.

Pemerintah daerah di Sulawesi Utara secara konsisten menerima penilaian audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun. Selama periode 2019 hingga 2024, mayoritas kabupaten dan kotamadya di Sulawesi Utara mencapai Pendapat yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pendapat Beralasan Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penilaian evaluatif yang diberikan oleh Akuntan Publik Bersertifikat (CPC) ketika laporan keuangan dianggap terwakili secara adil, dalam semua hal material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penyediaan evaluasi audit oleh CPC didasarkan pada empat kriteria utama, yaitu kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan informasi, kesesuaian dengan ketentuan peraturan, dan efektivitas mekanisme pengendalian internal (BPK RI, 2017; UU No. 15 Tahun 2004). Meskipun demikian, beberapa daerah masih menunjukkan catatan temuan audit yang menyoroti kekurangan mekanisme pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang peraturan (Badan Kontaksa Kompansa Kompansa Republik Indonesia, 2023; Tinjauan Hasil Ujian Semester BPK RI, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pendapat audit yang diberikan oleh Inspektorat Keuangan (PPK) terhadap tingkat korupsi dalam badan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara, dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan dari 15 kabupaten kota selama periode 2019 hingga 2024. Diantisipasi bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi empiris untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah.

KAJIAN TEORI

Teori Agency (Agency Theory)

Teori agensi awalnya diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan dinamika kontrak yang ada antara dua pihak, diidentifikasi sebagai prinsipal dan agen. Prinsipal dicirikan sebagai entitas yang memberikan wewenang atau memberdayakan individu lain untuk mengelola sumber daya, sedangkan agen adalah individu yang diberikan delegasi ini untuk melaksanakan tindakan dan membuat keputusan atas nama kepala sekolah.

Akuntabilitas

Sebagaimana diartikulasikan oleh Musfirah (2021:16), akuntabilitas merupakan dasar dari semua operasi pemerintah, dengan efektivitas operasi ini bergantung pada cara di mana mereka yang berwenang memenuhi tugas mereka, baik sesuai dengan mandat konstitusional maupun ketentuan hukum. Pentingnya akuntabilitas pemerintah digarisbawahi, karena memainkan peran penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Mumu, O., Pangkey, R., & Tangkau, J., 2023).

Korupsi

Korupsi berasal dari istilah Latin “*corruptio*,” yang berasal dari kata kerja “*corrumpere*,” yang berarti membusuk, mengganggu, mengacaukan, mengembalikan, atau terlibat dalam suap. Sebagaimana dijelaskan oleh Transparency International, ini berkaitan dengan tindakan pejabat publik, yang mencakup perwakilan terpilih dan pegawai negeri, yang secara ilegal dan tidak sah

mengumpulkan kekayaan untuk diri mereka sendiri atau bagi orang-orang di lingkungan terdekat mereka, melalui eksploitasi otoritas publik yang dipercayakan kepada mereka.

Opini Audit

Sejalan dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 2017 yang diundangkan oleh BPK RI tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pendapat audit merupakan pernyataan profesional oleh auditor mengenai tingkat kepatuhan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Hipotesis

H1 : Penilaian evaluatif yang diberikan oleh CPC berpengaruh singnifikan terhadap tingkat korupsi dalam pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Utara selama jangka waktu 2019 hingga 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, khususnya kerangka kerja sistematis yang menekankan analisis data numerik daripada teknik statistik untuk menghasilkan hasil yang objektif dan dapat diukur (Sahir, 2021). Pemilihan metodologi kuantitatif didasarkan pada pemanfaatan data sekunder yang direpresentasikan dalam bentuk numerik, bersumber dari laporan yang dihasilkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), di samping data yang berkaitan dengan kasus korupsi, yang kemudian menjadi sasaran analisis statistik.

Fokus penelitian ini mencakup semua entitas pemerintah daerah di kabupaten dan kotamadya Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki laporan pendapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (CPC), bersama dengan data terkait mengenai kasus korupsi yang dapat diakses selama durasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mencakup kabupaten atau kotamadya di Sulawesi Utara; sebaliknya, penelitian ini berfokus pada daerah tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah pengambilan sampel dengan tujuan, yang mengharuskan pemilihan sampel yang disengaja dipandu oleh faktor-faktor tertentu yang sesuai dengan maksud riset.

Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel digambarkan sebagai berikut:

- Kabupaten/kota berada dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Utara.
- Memiliki laporan opini audit BPK yang dipublikasikan secara konsisten selama periode 2019–2024.
- Memiliki data kasus korupsi yang dapat diverifikasi melalui publikasi media kredibel.
- Data tersedia dan dapat diakses secara publik

Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan ini, total limabelas kabupaten diidentifikasi yang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk berfungsi sebagai sampel penelitian.

Tabel 4.1
Proses penentuan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara	15
Kabupaten/kota yang memiliki data opini audit BPK lengkap (2019– 2024)	15

Kabupaten/kota yang memiliki data

kasus korupsi terpublikasi dan dapat diverifikasi

15

Sumber data BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Uji Chow

Seperti yang ditunjukkan oleh Widarjono (2023), Tes Chow digunakan untuk menentukan model yang lebih tepat antara Model Efek Umum (CEM) dan Model Efek Tetap (FEM) dalam kerangka regresi data panel. Secara khusus, jika nilai-p kurang dari 0,05, model Efek Tetap dianggap lebih tepat; sebaliknya, jika nilai-p lebih besar dari 0,05, model Efek Umum lebih disukai.

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.872738	(14,74)	0.5904
Cross-section Chi-square	13.753589	14	0.4682

Berdasarkan hasil Uji Chow (Sumber di olah dengan EvIEWS 12

Redundant Fixed Effects Test), nilai probabilitas (Prob.) untuk statistik F dicatat pada 0,5904 dan statistik Chi-kuadrat adalah 0,4682. Nilai probabilitas ini melebihi tingkat signifikansi 0,05 ($0,5904 > 0,05$ dan $0,4682 > 0,05$). Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan model yang lebih tepat untuk digunakan adalah Model Efek Umum (CEM) dibandingkan dengan Model Efek Tetap (FEM) (Widarjono, 2023; Basuki & Prawoto, 2022).

Uji Multiplier

Seperti yang disorot oleh Widarjono (2023), Uji Pengganda Lagrange digunakan untuk memastikan model yang paling efektif antara Model Efek Umum (CEM) dan Model Efek Acak (REM) dalam kerangka analisis regresi data panel. Nilai p di bawah 0,05 menunjukkan bahwa Model Efek Acak (REM) adalah pilihan yang lebih tepat, sedangkan nilai-p di atas 0,05 menunjukkan bahwa Model Efek Umum (CEM) mewakili alternatif yang lebih cocok

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects Null

hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis Time		
	Cross-section		Both
Breusch-Pagan	0.216010 (0.6421)	10.27080 (0.0014)	10.48681 (0.0012)
Honda	- 0.464769 (0.6790)	3.204809 (0.0007)	1.937501 (0.0263)
King-Wu	- 0.464769 (0.6790)	3.204809 (0.0007)	2.512571 (0.0060)
Standardized Honda	0.308046 (0.6210)	3.779631 (0.0001)	-1.272024 (0.8983)
Standardized King-Wu	- 0.308046 (0.6210)	3.779631 (0.0001)	0.273595 (0.6078)
Gourieroux, et al.	--	--	10.27080 (0.0021)

Sumber di olah dengan EvIEWS 12

Menurut temuan yang diperoleh dari Lagrange Multiplier Test (LM) menggunakan metodologi

Breusch-Pagan, nilai probabilitas (Prob.) 0,6421 pada penampang diamati. Nilai probabilitas ini melebihi ambang signifikansi yang ditetapkan pada 0,05 ($0,6421 > 0,05$). Menurut parameter pengambilan keputusan yang ditetapkan, ketika nilai-p melebihi 0,05, hipotesis nol (H^0) dipertahankan, dan Model Efek Umum (CEM) dianggap lebih tepat daripada Model Efek Acak (REM) (Widarjono, 2023; Basuki & Prawoto, 2022).

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Heteroskedastisitas

Pemeriksaan heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah perbedaan varians residual ada di antara pengamatan dalam konteks regresi. Model regresi yang kuat harus tanpa heteroskedastisitas, alih-alih menunjukkan varians residual yang konsisten, suatu kondisi yang dikenal sebagai homoskedastisitas.

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test

Equation: UNTITLED

Specification: Y C X

Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	5.877464	15	0.9817

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-68.36122	88
Unrestricted LogL	-65.42249	88

Sumber di olah dengan EvIEWS 12

Menurut temuan dari penilaian heteroskedastisitas menggunakan Uji LR Heteroskedasticity Panel Penampang, nilai probabilitas 0,9817 diturunkan. Nilai ini melebihi ambang signifikansi 0,05 ($0,9817 > 0,05$). Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan, ketika nilai probabilitas melebihi 0,05, hipotesis nol H^3 diterima, menunjukkan bahwa residu menunjukkan homoskedastisitas, atau bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas (Widarjono, 2023; Basuki & Prawoto, 2022).

Hasil Persamaan Pemeriksaan Regresi Data Panel Dasar

Memanfaatkan hasil yang diperoleh dari estimasi analisis regresi pada data panel yang tidak rumit melalui Model Efek Umum, persamaan regresi yang dihasilkan dapat diartikulasikan sebagai berikut:

$$Y = 4.89694656489 - 1.43129770992X$$

Keterangan:

Y = Tingkat korupsi X = Opini audit BPK

Sesuai dengan persamaan regresi yang disebutkan di atas, interpretasi komprehensif dapat diartikulasikan sebagai berikut:

1. Angka invarian 4,8969 menunjukkan bahwa jika variabel yang mewakili pendapat audit CPC diperlakukan sebagai tidak berubah, tingkat korupsi yang diantisipasi dalam kerangka pemerintah daerah diperkirakan sebesar 4.8969.

2. Nilai koefisien regresi untuk variabel opini audit CPC, yang diukur pada -1,4312, menunjukkan bahwa peningkatan satu unit dalam pendapat audit CPC dikaitkan dengan pengurangan tingkat korupsi sebesar 1,4312, asalkan semua variabel lainnya tetap tidak berubah.

Koefisien regresi yang menunjukkan nilai negatif menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik antara pendapat audit CPC dan tingkat korupsi, menunjukkan bahwa peningkatan pendapat audit yang

diterima oleh pemerintah daerah berkorelasi dengan penurunan tingkat korupsi. Temuan ini menunjukkan bahwa pendapat audit CPC memberikan efek yang merugikan pada kejadian korupsi di dalam badan pemerintah daerah, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dalam manajemen keuangan daerah dikaitkan dengan berkurangnya kecenderungan praktik korupsi untuk terwujud (Widarjono, 2023; Basuki & Prawoto, 2022; Ghozali, 2021).

Hasil Analisis Output Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi berfungsi sebagai metrik untuk menilai sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi yang terlihat pada variabel dependen dalam konteks analisis regresi. Koefisien ini memiliki nilai yang membentang dari 0 hingga 1; dengan demikian, peningkatan koefisien penentuan menandakan peningkatan kapasitas variabel independen untuk menjelaskan fluktuasi variabel dependen.

R-squared	0.331319	Mean dependent var	0.666667
Adjusted R-squared	0.323720	S.D. dependent var	0.635999
S.E. of regression	0.523021	Akaike info criterion	1.563583
Sum squared resid	24.07252	Schwarz criterion	1.619134
Log likelihood	-68.36122	Hannan-Quinn criter.	1.585984

Sumber di olah dengan Eviews 12

Statistik R-kuadrat sebesar 0,331319 menunjukkan bahwa variabel opini audit CPK menyumbang 33,13% dari variabilitas yang diamati dalam tingkat korupsi dalam pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang jangka waktu penelitian 2019 hingga 2024. Sebaliknya, sisa 66,87% dikaitkan dengan faktor-faktor asing yang tidak tercakup dalam kerangka penelitian, seperti kemanjuran mekanisme pengendalian internal, transparansi dalam manajemen fiskal regional, integritas pejabat pemerintah, pengawasan internal, dan penentu kelembagaan tambahan. Koefisien R-kuadrat yang Disesuaikan 0,323720 mengungkapkan bahwa, setelah menyesuaikan jumlah variabel independen dalam model, kapasitas variabel independen ini untuk menjelaskan variabilitas variabel dependen tetap pada 32,23%. Dengan demikian, kerangka penelitian memiliki kapasitas yang cukup untuk secara efektif menggambarkan hubungan antara pendapat audit CPC dan prevalensi korupsi di entitas pemerintah daerah.

UJI T (Persial)

Uji t berfungsi sebagai metode statistik untuk memeriksa dampak variabel independen pada variabel yang sebagian bergantung.

Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 05/20/26
 Time: 18:34 Sample: 2019 2024
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 15
 Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.896947	0.643008	7.615685	0.0000
X	-1.431298	0.216758	-6.603207	0.0000

Sumber di olah dengan Eviews 12

Nilai statistik-T -6,603207 disertai dengan nilai probabilitas 0,0000 menandakan bahwa nilai probabilitas jatuh di bawah ambang signifikansi yang ditetapkan 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Menurut kriteria pengambilan keputusan yang ditetapkan, nilai probabilitas yang kurang dari 0,05

menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik pada variabel dependen (Ghozali, 2021; Widarjono, 2023). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendapat audit CPK memiliki dampak negatif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat korupsi di dalam pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa pendapat audit yang diberikan oleh CPK memiliki dampak negatif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat korupsi yang ada di pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapat audit yang diperoleh oleh entitas pemerintah daerah dikaitkan dengan potensi peningkatan tingkat korupsi. Oleh karena itu, hipotesis penelitian telah dibuktikan.

PEMBAHASAN

Berasal dari hasil analisis regresi yang dilakukan pada data panel yang menggunakan metodologi Common Effect Model (CEM), disimpulkan bahwa pendapat audit yang diberikan oleh CPC memiliki dampak substansial terhadap kejadian korupsi, sebagaimana dibuktikan dengan korelasi negatif. Konsekuensi dari penelitian ini dapat dijelaskan melalui kerangka Teori Badan, yang menyatakan bahwa dalam hubungan bilateral antara kepala sekolah (masyarakat) dan agen (pemerintah daerah), ada potensi konflik kepentingan yang berasal dari asimetri informasi. Pemerintah daerah, sebagai entitas yang bertugas mengawasi keuangan publik, memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi relatif terhadap publik, sehingga memfasilitasi peluang untuk pelanggaran, termasuk korupsi. Dalam konteks ini, audit eksternal yang dilakukan oleh CPC berfungsi sebagai mekanisme regulasi yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan informasi tersebut. Akibatnya, pendapat audit berfungsi sebagai instrumen tata kelola bagi publik untuk menilai apakah praktik manajemen keuangan regional telah dilaksanakan dengan cara yang wajar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendapat audit memainkan peran penting dalam membina kerangka kerja manajemen keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Pendapat audit yang dikeluarkan oleh CPC didasarkan pada beberapa faktor penting, termasuk kepatuhan terhadap undang-undang hukum, kemanjuran mekanisme pengendalian internal, dan keselarasan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ketika pemerintah kota berhasil memenuhi tolok ukur ini, kemungkinan pelanggaran keuangan dapat dikurangi, sehingga secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan prevalensi korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menilai pengaruh pendapat audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (CPC) terhadap prevalensi korupsi di antara entitas pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara selama jangka waktu 2019 hingga 2024. Analisis dan wacana yang diartikulasikan dalam pasal sebelumnya memuncak dalam temuan bahwa pendapat audit yang dikeluarkan oleh CPC memiliki dampak substansial pada tingkat korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat audit CPC memberikan pengaruh yang merugikan dan signifikan secara statistik terhadap kejadian korupsi. Ini menyiratkan bahwa peningkatan pendapat audit yang menguntungkan yang diberikan kepada pemerintah daerah dikaitkan dengan penurunan prevalensi korupsi. Dalam istilah lain, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah kemungkinan akan mengurangi terjadinya praktik korupsi. Selanjutnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa model yang digunakan secara mahir menjelaskan hubungan antara variabel yang diperiksa, karena pendapat audit menjelaskan beberapa variabilitas dalam tingkat korupsi, terlepas dari pengaruh potensial dari faktor eksternal lainnya. Akibatnya, tujuan penyelidikan ini telah tercapai secara efektif,

menunjukkan bahwa pendapat audit CPC memberikan efek yang signifikan pada tingkat korupsi dalam kerangka kerja pemerintah daerah.

Mengingat temuan yang diperoleh dari penelitian, penulis mengusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: Entitas pemerintah daerah seharusnya tidak hanya memprioritaskan pencapaian evaluasi audit yang menguntungkan, tetapi juga harus meningkatkan kualitas praktik manajemen keuangan untuk mengurangi prevalensi kegiatan korupsi. Diantisipasi bahwa Partai Komunis Tiongkok (CPC) akan bertahan dalam upayanya untuk meningkatkan standar inspeksi dan memperkuat mekanisme pengawasan untuk membantu pencegahan anomali dalam tata kelola keuangan regional. Untuk penyelidikan selanjutnya, disarankan untuk memasukkan variabel tambahan seperti kerangka kerja pengendalian internal, langkah-langkah transparansi, dan mekanisme pengawasan, sehingga memperkaya kelengkapan dan kedalaman hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK. BPK RI.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kantohe, M. S. S., & Sumual, F. M. (2023). Peran Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Good University Governance. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 1-12.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan Tahunan KPK 2023. KPK.
- Mumu, O., Pangkey, R., & Tangkau, J. (2023). Pengaruh Peran Perangkat 88 Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(4), 78-87.
- Musfirah, S. (2021). Akuntabilitas publik dalam peningkatan kualitas pemerintahan. *Jurnal Administrasi Negara*, 17(1), 1–10.
- Sahir, R., & Suryani, E. (2021). Pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi. *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan*, 6(1), 22–35.
- Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024.
- Widarjono, A. (2023). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya disertai panduan EViews* (Edisi 5). UPP STIM YKPN.